

Kesenjangan Pembangunan di Tingkat Lokal: Refleksi Atas Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

Fathur Rahman^{1*}, Arifah Astagini², Ahmad Dellan Fahmi Effendy³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP
Universitas Brawijaya Malang Indonesia 65145
fathur_rahman@ub.ac.id

Abstract

Development a process that is carried out continuously in order to improve social and economic indicators in a region over time. Blitar Regency is one of regions that has made efforts to improve development. However, in reality there are still areas in Blitar which have development gap, the development only focuses on North Blitar compared to South Blitar. This makes researcher interested in going over the Development Gap in Blitar District as a study. This study aims to determine the causes of the development gap in northern and southern Blitar Districts, in education and health from 1999-2014 by using case study of Kanigoro and Bakung Districts. In this study, direct interviews were conducted with all actors involved with several indicators from education and health sectors which were analyzed using qualitative method. The results of the analysis are presented through interviews which indicate that the causes of development gap in northern and southern Blitar in the education sector are the construction of supporting facilities more focused in Kanigoro District as the downtown, while in Bakung District is only for building maintenance. So, that the school supporting facilities in the Kanigoro District are more complete compared to the Bakung District. Furthermore, development gap also occurs in the health sector, the health center facilities in Kanigoro District does not yet have hospitalization, while in Bakung District has 6 beds for hospitalization. However, Kanigoro District still has a more complete quality of health because in the Kanigoro District there is a Medika Husada Hospital and close to the Ngudi Waluyo general hospital in Wlingi District.

Keywords: Development Gap, Education, Health, Blitar Regency.

Abstrak

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Kabupaten Blitar adalah salah satu daerah yang melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan. Namun, kenyataannya masih ada daerah di Kabupaten Blitar yang mengalami kesenjangan pembangunan, pembangunan hanya berfokus di Blitar Utara dibandingkan Blitar Selatan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Blitar menjadi studi dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan di Kabupaten Blitar bagian utara dan selatan, dalam bidang pendidikan dan kesehatan mulai tahun 1999-2014 dengan menggunakan studi kasus Kecamatan Kanigoro dan Bakung. Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada seluruh aktor yang terlibat dengan beberapa indikator dari bidang pendidikan dan kesehatan yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis disajikan melalui hasil wawancara yang menunjukkan bahwa penyebab kesenjangan pembangunan di Blitar utara dan selatan pada bidang pendidikan adalah pembangunan fasilitas pendukung di sekolah lebih fokus dibangun di Kecamatan Kanigoro sebagai pusat kota, sedangkan di Kecamatan Bakung hanya untuk pemeliharaan infrastruktur bangunan. Sehingga mengakibatkan fasilitas pendukung sekolah di Kecamatan Kanigoro lebih lengkap dibandingkan dengan Kecamatan Bakung. Selanjutnya, pada fasilitas puskesmas di Kecamatan Kanigoro belum memiliki rawat inap dan ruang bersalin, sedangkan di Kecamatan Bakung memiliki 6 tempat tidur untuk rawat inap dan ruang bersalin. Hal ini menunjukkan fasilitas Puskesmas Bakung lebih tinggi dibandingkan Puskesmas Kanigoro. Namun, Kecamatan Kanigoro tetap memiliki kualitas kesehatan yang lebih lengkap karena di Kecamatan Kanigoro terdapat Rumah Sakit Swasta Medika Husada dan dekat dengan RSUD Ngudi Waluyo di Kecamatan Wlingi.

Kata Kunci: *Kesenjangan Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Kabupaten Blitar.*

PENDAHULUAN

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Implementasi otonomi daerah sudah berjalan selama dua dasawarsa. Banyak peneliti yang mengira dengan kebijakan tersebut maka otomatis terjadi pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu, banyak pemikir telah berkesimpulan dengan pembagian kewenangan, urusan maka mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Hal yang kontras atau kondisi yang berkebalikan dengan cita-cita otonomi daerah justru terlihat ketika menganalisis kesenjangan pembangunan antara Blitar bagian Utara dengan Blitar bagian Selatan. Yang dimaksud dengan Blitar bagian Utara adalah wilayah Kabupaten Blitar yang lokasinya berada di sebelah utara Sungai Brantas. Wilayah secara administratif meliputi Kecamatan Selorejo, Kesamben, Selopuro, Kanigoro,

Doko, Wilingi, Gandusari, Talun, Garum, Nglegok, Ponggok, Udanawu Srengat, dan Wonodadi. Sedangkan Blitar bagian Selatan meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun, Sutojayan dan Kademangan. Hal ini diperkuat oleh temuan dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar bahwa selama empat tahun terakhir, nilai skoring Pendidikan yang tertinggi tahun 2014-2018 untuk beberapa kecamatan yang berada di Blitar Utara, 0,0386–0,0478. Nilai skor rendah sampai terendah berada di wilayah Blitar Selatan, 0,010-0,030. Selain itu, rendahnya indeks sarana prasarana pelayanan pendidikan mulai jenjang sekolah Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel: 1
Indeks Sarana Pendidikan Dasar
Kabupaten Blitar

Kecamatan	Area	Nilai	Keterangan
Srengat, Kademangan, Wilingi, Kesamben	Blitar bagian Utara	0,0386-0,0478	Indeks Tinggi
Nglegok, Doko	Blitar bagian Selatan	0,0242-0,0360	Indeks Sedang
Bakung, Binangun, Wonotirto	Blitar bagian Selatan	0,010-0,030	Indeks Rendah

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar 2019

Hal yang menarik lainnya, temuan adanya kesenjangan dalam sektor Pendidikan yaitu terhambatnya proses

pemerataan pembangunan infrastruktur pendukung. Pola pembangunan yang tidak merata dan ditemukannya perbedaan karakteristik kecamatan di Kabupaten Blitar menjadi masalah berikutnya sehingga menyebabkan pola pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan menjadi berbeda-beda. Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar bagian Utara, rata-rata persentasenya cukup tinggi dibandingkan di wilayah Blitar bagian Selatan. Menurut Myrdal dalam (Jhingan, 2010) banyak faktor yang memengaruhi kesenjangan suatu wilayah. Myrdal dalam (Jhingan, 2010) bahwa kesenjangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*).

Dengan kata lain, perbedaan tingkat kualitas pendidikan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan hasil pembangunan. Ketika terjadi disparitas pembangunan, umumnya akan terjadi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pembangunan daerah selalu muncul dan cenderung semakin melebar.

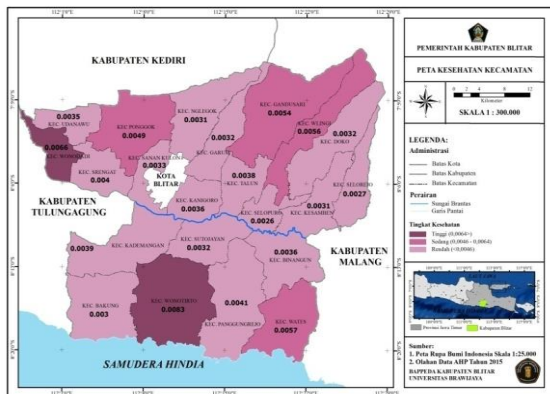
Menurut Myrdal *backwash effect* lebih besar dibanding *spread effect*. Oleh karena itu, apabila tingkat pembangunan

di area strategis atau lebih tepatnya di daerah Blitar bagian Utara yang masuk di zona ibukota Blitar, maka pembangunan yang dicapai kecamatan yang lebih maju selalu lebih cepat dari pada yang terjadi di kecamatan wilayah Blitar wilayah Selatan. Andaikata *spread effect* lebih besar dibandingkan dengan *backwash effect* tentu tidak menjadi masalah. Namun temuan dari penelitian ini bahwa banyak kecamatan miskin, *spread effect* yang terjadi jauh lebih kecil daripada *backwash effects* yang dialami sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi kecamatan yang kaya akan memperlambat pembangunan di daerah kecamatan yang miskin. Akibatnya jurang kesejahteraan antara kedua daerah Blitar wilayah Utara dan Blitar wilayah Selatan akan semakin melebar. Hal ini dalam jangka panjang akan menyebabkan tingkat ketimpangan di sektor pendidikan cukup lebar.

Kesenjangan antara Blitar wilayah Utara dan Selatan tidak bisa dipungkiri akibat alokasi pembangunan bertumpu di wilayah bagian Utara. Proyek pembangunan terpusat di wilayah bagian Utara, sedangkan di wilayah bagian Selatan sebagian besar masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti air bersih dan listrik. Kesenjangan

keadaan tersebut menyebabkan wilayah bagian Utara menanggung beban lingkungan dan sosial, sebagai konsekuensi pusat-pusat perekonomian di Kabupaten Blitar bagian Utara. Demikian pula dengan daya dukung infrastruktur yang semakin hari semakin kurang memadai seiring pesatnya pertumbuhan penduduk.

Gambar 2
Peta Kabupaten Blitar



Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2019

Berdasarkan uraian di awal tadi, maka tulisan ini menghadirkan jawaban dari apa saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan dalam Sektor Pendidikan di Kabupaten Blitar. Kesenjangan ini telah menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Masyarakat mempunyai logika sendiri untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolahan yang mempunyai prospek tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan tingkat risiko

bencana yang lebih rendah, sehingga tidak dapat dihindari jika sistem penerapan zonasi pendidikan oleh pemerintah masih lebih terkonsentrasi di daerah Blitar bagian Utara dengan prasarananya yang lebih lengkap.

METODE

Tulisan ini didesain menggunakan metode penelitian studi kasus. Lokasi penelitiannya berada di wilayah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Data yang terkumpul, terolah berasal dari data primer berupa wawancara dengan berbagai informan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, perwakilan guru, anggota DPRD 2019-2024, Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sedangkan data Sekundernya berasal dari dokumen-dokumen dari Renstra Kabupaten Blitar 2011-2016, 2016-2021, Kemudian untuk tahapan analisis data dari tulisan ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara induktif dimulai dari lapangan atau fakta empiris sesuai dengan pembahasan perumusan kesenjangan pembangunan antara Blitar Utara dan Selatan sebagai

rancangan untuk mencari apa saja yang jadi penyebabnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kabupaten Blitar terdapat sungai yang sangat besar yaitu Sungai Brantas. Sungai ini membelah wilayah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu Utara dan Selatan. Bagian Utara mayoritas merupakan dataran rendah dan sebagian dataran tinggi karena dekat dengan Gunung Kelud yang mencapai ketinggian antara 105-349 meter dari permukaan air laut. Gunung Kelud tersebut merupakan gunung berapi aktif yang membuat struktur tanahnya lebih subur serta dilalui oleh banyak sungai juga dimana merupakan jalur lahar ketika gunung bererupsi. Wilayah bagian Utara, tepatnya di Kecamatan Kanigoro merupakan wilayah area pusat pemerintahan, menjadi lokasi ibukota Kabupaten Blitar. Selain itu, wilayah bagian Utara tersebut menjadi sentra pertumbuhan ekonomi karena menjadi urat nadi sektor transportasi baik orang maupun barang, yang menjadi jalur distribusi dari Malang ke arah Kabupaten Tulungagung, Trenggalek serta wilayah *Mataraman* lainnya.

Sedangkan Blitar bagian Selatan mayoritas merupakan dataran tinggi

dengan ketinggian antara 150-420 meter diatas permukaan air laut. Wilayah bagian Selatan merupakan daerah pesisir pantai selatan dengan topografi pegunungan berbatu yang membuat struktur tanah yang kurang subur, tidak stabil (tanah gerak, amblas), akses jalan tidak sebaik jalan-jalan yang ada di wilayah Blitar bagian Utara (Badan Pusat Statistik, 2018).

Kemudian, dalam dimensi pertumbuhan ekonomi lokal tidak selalu identik dengan pembangunan, karena pertumbuhan terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sedangkan pembangunan memiliki dimensi yang lebih luas (*growth and change*) mencakup perubahan struktur ekonomi sosial serta terjadi dalam rentang jangka panjang. Ada beberapa indikator yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, dimana indikator-indikator tersebut saling terkait dalam suatu proses pembangunan suatu daerah. Ada tiga indikator dijelaskan di sini antara lain:

Sumber Daya Manusia (SDM)

Temuan dari tulisan ini bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar. Banyak warga di Kabupaten Blitar lebih memilih

bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan Data Bappeda jumlah TKI yang berasal dari Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai tanggal 1 Januari 2020 berjumlah 17.135 orang (Bappeda, 2020). Selain itu data yang dihimpun dari gotki.blitar.go.id, TKI yang berasal dari Kabupaten Blitar kecamatan-kecamatan di Blitar bagian Selatan seperti, Binangun, Ponggok, Doko dan kecamatan lainnya.

Disamping itu, jarak yang jauh serta akses medan jalan yang sulit ke sekolah telah menyurutkan semangat anak-anak dan orang tuanya untuk menyekolahkan. Di Kecamatan Binangun, rata-rata jarak antara sekolah dengan pemukiman warga 1 km dengan topografi yang naik-turun dan berkelok-kelok (Bappeda, 2018).

Sumber Daya Alam (SDA)

Manajemen Sumber Daya Alam (SDA) terlihat belum maksimal, terutama di wilayah Blitar bagian Selatan. Dalam mengelola potensi kekayaan daerah, utamanya di sektor Pariwisata alam pantai selatan yaitu Pantai Jolotundo, ternyata berdasarkan temuan di lapangan ternyata belum masuk dalam agenda kebijakan yang serius untuk digarap. Pemerintah Kabupaten Blitar kurang jeli (cermat) dalam melihat masalah yang dialami oleh

masyarakat di Blitar bagian Selatan, sehingga segala formulasi kebijakan di berbagai sektor untuk membangkitkan ekonomi, kelas sosial dalam mengejar ketertinggalan di Blitar bagian Selatan tidak tercapai dan terjadi bias perencanaan wilayah. Semestinya Pemerintah Kabupaten Blitar lebih memfokuskan pada agenda pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) untuk mendongkrak pariwisata bahari di pantai selatan dengan segala potensi kekayaan lautnya. Selebihnya rencana pembangunan JLS tersebut sudah masuk ke dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tetapi pada kenyataannya, arah pembangunan Kabupaten Blitar sejak tahun 2016, belum memprioritaskan pembangunan JLS. Padahal wilayah Blitar Selatan juga memiliki perkebunan cokelat di Kecamatan Kademangan yang sangat melimpah dan dapat berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menyejahterakan warganya apabila dikembangkan dan dikelola lebih baik lagi yang seharusnya diprioritaskan dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Selain itu, infrastruktur jalan untuk masuk ke wilayah Blitar bagian Selatan masih mengalami kendala karena masih banyak ruas jalan yang rusak, amblas, longsor, tanah gerak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bidang I Bappeda Kabupaten Blitar, Ulfatul Umami (*wawancara penulis*, 3 Desember 2019).

Jika akses jalan diperbaiki dan ada prioritas dalam pengembangan wisata di Blitar bagian Selatan maka dapat mendorong wisatawan dan akan tertarik untuk berkunjung ke sana. Hal ini sesuai dengan temuan dari (Fan, 2011) bahwa investasi berupa infrastruktur untuk menghubungkan daerah pesisir dan pedalaman serta di daerah tertinggal yang memiliki hasil cukup tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan.

Kemudian menurut (Adinugroho, 2017) bahwa sektor Pariwisata memiliki efek positif terhadap pembangunan wilayah di tingkat lokal. Sementara untuk Blitar bagian Utara memiliki potensi alam di sektor Pertanian Holtikultura, pertambangan pasir disepanjang sungai di jalur lintas material erupsi Gunung Kelud. Berkat dengan adanya keberadaan

Gunung Kelud, di Blitar bagian Utara tanahnya subur, dan lebih produktif menghasilkan sayur mayur. Disamping itu, di Kawasan *Mataraman* Jawa Timur permintaan pasir, dipasok dari daerah Kabupaten Blitar dan Kediri, karena pasirnya terbaik setelah pasir di Lumajang. Masyarakat di Blitar bagian Utara sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak, seperti ternak bebek yang ada di Kecamatan Ponggok, dan bekerja di bidang industri, jasa dan pertokoan.

Untuk Blitar bagian Selatan mayoritas masyarakatnya sebagai pekebun, dan nelayan. Di sektor Perkebunan juga merupakan potensi unggulan seperti cokelat, dan cengkeh dan juga ada beberapa pertambangan galian C seperti tanah liat sehingga banyak juga masyarakat menggali tanah liat untuk pembuatan gerabah. Hal tersebut sangatlah berbeda dengan tanah di Blitar bagian Utara dan Selatan, kontur tanah di Blitar bagian Utara relatif datar dan subur sedangkan di Blitar di bagian Selatan berupa perbukitan gersang, tandus, dan tanahnya gerak, mudah amblas.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Blitar juga

berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya, adanya akses internet yang lebih mudah diakses karena adanya peningkatan kualitas dan jaringan internet. Dengan adanya peningkatan kualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, artinya penggunaan perangkat dimana di dalamnya ada *tools* yang terkait dengan elektronik melalui *software-software* berbasis *android* dapat mempermudah akses. Contohnya, Rumah Sakit Wlingi sudah ada antrian untuk melakukan pendaftaran berobat melalui *Short Message Service* (SMS), padahal pada zaman dahulu pasien harus datang terlebih dahulu ke Rumah Sakit (RS) untuk melakukan pendaftaran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang I Bappeda Kabupaten Blitar, Ulfatul Umami (wawancara penulis, 3 Desember 2019).

Selain itu, karena adanya sistem seperti Data Proyeksi Pendidikan (Daprodik) dapat diketahui pula kesenjangan yang terjadi, misalkan, kondisi sekolah-sekolah yang ada di setiap kecamatan di Blitar bagian Utara dan Selatan. Dari sistem informasi tersebut dapat diketahui kondisi yang ada,

sehingga dapat digunakan sebagai dasar penggunaan kebijakan untuk pemerataan fasilitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan agar anak-anak usia sekolah semakin mudah untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1999-2000 masih banyak anak-anak sekolah yang lulus SD namun belum bisa membaca. Hal ini disebabkan karena guru yang tidak pernah masuk ke sekolah dikarenakan jalan menuju ke sekolah yang jelek. Salah satu daerah tersebut adalah di Blitar selatan, yaitu di Dusun Banyuurip, Desa Ngadipuro. Namun, dari tahun 1999-2014 peningkatan fasilitas terus ditingkatkan mulai dari alokasi dan kurikulum seperti yang disampaikan oleh Kepala LSM Sitas Desa Farhan Mahfuzi (wawancara 29 November 2019).

Pada tahun 1999, proses kegiatan belajar mengajar untuk tingkat SMP masih bergabung dengan bangunan di SD, atau yang biasa disebut SMP satu atap. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati bahwa pemerintah pada tahun tersebut tidak dapat langsung membangun satu SMP di tingkat kecamatan. Salah satu keuntungan dari SMP satu atap adalah kebutuhan dasar sekolah secara

langsung dapat terpenuhi, dari anak-anak SD bisa langsung melanjutkan ke SMP. Pada tahun 1999 sampai 2000 awal anak-anak tidak bisa melanjutkan ke SMP dikarenakan jarak yang jauh. Contohnya di Kecamatan Wonotirto SMP yang paling dekat adalah di Kecamatan Sutojayan yang tidak jauh berada di Ibukota Kabupaten Blitar yakni di Kecamatan Kanigoro, artinya lokasi tersebut masih strategis untuk diakses oleh masyarakat Blitar bagian tengah karena lokasinya tidak jauh dari jalur jalan nasional, lagi-lagi jika SMP tersebut dibangun di Kecamatan Sutojayan tersebut masih sangatlah jauh untuk dijangkau masyarakat pesisir pantai selatan.

Pembangunan pendidikan di Blitar selatan agak terlambat karena di awal, pembangunan memang sudah terlambat. Jika alokasi dana pembangunan diprioritaskan di Blitar selatan maka di utara juga akan terbengkalai, padahal masyarakat Kabupaten Blitar banyak yang tinggal di Kabupaten Blitar bagian Utara seperti yang disampaikan oleh Ketua LSM Sitas Desa, Farhan Mahfuzi (*wawancara penulis*, 29 November 2019)

Bahkan saat ini tidak ada lagi alasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah, hal ini dikarenakan pemerintah

menggratiskan biaya pendidikan sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan. Selain itu, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan agar sekolah dapat mencetak generasi yang unggul. Seperti yang diketahui sekolah harus dapat mengikuti perkembangan yang ada, sehingga diperlukan adanya peningkatan mutu pendidikan supaya kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Saat ini pemerintah daerah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada anak-anak kurang mampu di tingkat SD dan SMP. Sedangkan, untuk tingkat SMA adalah kewenangan dari Pemerintah Provinsi.

Kebijakan mengenai sekolah gratis ini juga ditopang dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), oleh karena itu program ini semakin mendukung adanya pemerataan pendidikan di daerah. Di Kabupaten Blitar tahun ini mengambil anggaran dari APBD untuk membuat program BKSM yakni Bantuan Khusus Anak Kurang Mampu, yang mana untuk pendidikan SD adalah Rp.350.000 sedangkan untuk SMP adalah Rp.600.000 pertahun. Dari bantuan tersebut anak-anak kurang mampu dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tas, seragam,

sepatu, buku, alat tulis, dan sebagainya. Biaya tersebut dapat menopang kebutuhan anak sekolah yang tidak mampu dan hal tersebut merupakan kewajiban Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengupayakan peningkatan dan pemerataan pendidikan. Jadi setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin.

Selain peningkatan kualitas dari segi biaya, juga ada peningkatan kurikulum dan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur selalu disamaratakan, baik dari anggaran maupun pelaksanaannya. Selain itu, sarana dan prasarana terus ditingkatkan karena memperoleh anggaran dari DAK (Dana Alokasi Anggaran). DAK dapat digunakan untuk rehabilitasi bangunan sekolah, misalnya RKB (Ruang Kelas Baru), ruang perpustakaan, jamban, dan lain sebagainya. Akan tetapi antara Blitar Utara dan Blitar Selatan tentu memiliki perbedaan, entah itu letak geografis maupun kultur masyarakatnya. Padahal antara Blitar Utara dan Blitar Selatan merupakan satu kabupaten, tapi di utara lebih ke dataran rendah sedangkan yang selatan adalah pegunungan.

Meskipun dari segi anggaran disamaratakan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, namun masih tetap memiliki perbedaan karena antara satu daerah dengan daerah lain hasilnya belum tentu sama. Letak perbedaan tersebut didasarkan pada daerah rawan bencana, infrastruktur akses ke sekolah sarana dan prasarana bangunan dan fasilitas pendukung lainnya seperti jaringan listrik, air dan internet sehingga menjadikannya jumlah murid dan guru yang berbeda.

Salah satu penyebab terhambatnya pembangunan di Kabupaten Blitar adalah perpindahannya ibukota yang semula masih berdiri dan ikut di Kota Blitar sekarang pindah di Kecamatan Kanigoro. Sehingga hal tersebut lebih memprioritaskan rencana pembangunan ibukota baru Kabupaten Blitar untuk membangun kantor-kantor instansi pemerintahan daerah yang baru sebagai prioritas pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Luthfi Aziz bersama penulis (*wawancara penulis*, 27 Maret 2019).

Meskipun pembangunan dipusatkan di Blitar bagian Utara khususnya di Kecamatan Kanigoro bukan berarti yang lain ditinggalkan atau tidak diperhatikan,

hal tersebut merupakan percepatan pembangunan di pusat kota. Lalu di Blitar selatan merupakan daerah pegunungan, sehingga sering terjadi bencana seperti tanah longsor apabila dilanda hujan terus menerus. Sedangkan di Blitar utara hal tersebut sangat jarang terjadi karena daerahnya merupakan dataran rendah. Selain alasan letak geografis yang berbeda, infrastruktur jalan di Blitar bagian Utara dan Selatan menunjukkan kesenjangan pembangunan. Dimana jalan yang ada di Blitar bagian Selatan terutama Kecamatan Bakung sampai Wates merupakan tanah dengan tipe tanah gerak, tidak stabil dengan tofografi berupa pegunungan yang berkelok-kelok. Hal ini disebabkan karena struktur tanah di daerah pegunungan adalah tanah gerak, sehingga memerlukan perbaikan lebih cepat dibanding daerah dataran rendah yang memiliki struktur tanah lebih stabil.

Akses jalan inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah daerah, perbedaan letak geografis menyebabkan biaya pembangunan di Blitar selatan lebih tinggi daripada Blitar utara. Apabila pemerintah membangun jalan secara bertahap, pada akhirnya masyarakat meminta untuk disamaratakan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan

biaya yang cukup besar apalagi jalan di Blitar selatan membutuhkan bahan yang lebih mahal dari Blitar utara. Jika di Blitar utara bisa digunakan untuk membangun 100 km, tapi di Blitar selatan hanya dapat membangun 50 km saja. Selain akses jalan, akses internet juga cukup sulit di Blitar selatan karena wilayahnya yang pegunungan. Namun pemerintah terus melakukan upaya-upaya agar akses internet dapat masuk, seperti disediakan antena BTS atau jaringan internet via satelit seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Luthfi Aziz bersama penulis, 27 Maret 2019.

Selain akibat dari faktor topografi dan geografis, hal lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan adalah keadaan sosial masyarakat. Masyarakat di pegunungan dengan masyarakat kota memiliki perbedaan, contohnya bagi masyarakat daerah pegunungan sudah mendapatkan akses pendidikan itu sudah baik. Namun berbeda dengan masyarakat kota yang masih mengikuti les atau bimbingan belajar. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, yaitu Luthfi Aziz bersama penulis (*wawancara penulis*, 27 November 2019).

Pemerintah Daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Mutu kualitas pendidikan dapat dilihat pada tahun ini sekolah sudah 100% melaksanakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) untuk SMP, padahal dulu UN masih berbasis kertas dan tahun kemarin masih separuh dalam melaksanakan UNBK. Dalam pengadaan komputer pemerintah daerah (pemda) akan sedikit membantu melalui dana dari APBD, lalu setengahnya lagi adalah dana dari sekolah masing-masing yang diambilkan dari dana BOS atau PSM. Namun untuk PSM adalah kewenangan dari Komite Sekolah (KS) bukan dari Dinas Pendidikan, PSM sendiri lebih ke bantuan atau sumbangan dari masyarakat, berbeda dengan pungutan jika pungutan tentu saja sangat dilarang untuk dilakukan di sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar (*wawancara penulis*, 21 November 2019).

Salah satu hal yang wajib dilakukan oleh sekolah adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Tidak hanya pada hal-hal yang mendadak, namun setiap bulan Kepala Sekolah akan selalu melakukan rapat dengan Dinas Pendidikan. Rapat yang dilakukan setiap

bulan itu adalah MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dimana pihak penyelenggaraanya adalah MKKS itu sendiri dan materi yang akan diterima juga dari Dinas Pendidikan. Salah satu contoh rapat tersebut adalah *try out* SD yang membahas jadwal, kebijakan, dan anggaran yang dikeluarkan. Untuk anggaran *try out* mulai berlaku pada tahun ini, sedangkan dulu anggaranya berasal dari sekolah.

Selain kurikulum, anggaran, dan infrastruktur pemerintah juga memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru. Jika dulu calon murid bisa dengan bebas memilih sekolah manapun yang dituju, maka sekarang pemerintah membatasi dengan sistem zonasi. Sistem zonasi ini mengharuskan calon murid memiliki tempat tinggal dengan jarak maksimal tertentu dari sekolah yang dipilih, jika tempat tinggal lebih dari jarak yang ditentukan sekolah maka anak tersebut tidak akan diterima. Di Kabupaten Blitar sistem zonasi ini sudah memasuki tahun keempat dengan ketentuan 90 persen memakai sistem zonasi dan sisa 10 persen untuk jalur prestasi di luar zonasi sebagaimana yang telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Kemdikbud, 2019).

Jadi calon murid baru masih dapat mendaftarkan diri ke sekolah di luar zonasi dengan kuota 10 persen. Akibat dari adanya sistem zonasi ini sekarang tidak ada sekolah unggulan, semua sekolah memiliki kualitas yang baik dan semua sekolah harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya adalah angka melek huruf. Angka melek huruf di Kabupaten Blitar mulai dari tahun 1999-2014 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata anak yang tidak sekolah adalah bekerja, tetapi pemerintah terus melakukan pemetaan data dari angka kelulusan SD atau angka kelulusan SMP. Selanjutnya pemerintah akan bekerja sama dengan lintas sektoral sehingga anak yang bekerja bisa bersekolah dan angka melek huruf bisa ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Rina Mardianti (*wawancara penulis*, 21 November 2019).

Setiap bulan sekolah selalu melakukan rapat MGMP (Musyawarah

Guru Mata Pelajaran) untuk membahas apa saja yang perlu disampaikan atau diajarkan guru kepada siswa. Rapat ini bertujuan agar para siswa nanti dapat memahami keterkaitan bab-bab yang akan diberikan oleh guru. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Rina Mardianti (*wawancara penulis*, 21 Maret 2019).

Oleh karena itu, kualifikasi pengajar harus linear dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini diharapkan agar pengajar dapat lebih memahami dan fokus dengan ilmu yang dimiliki. Sehingga kualitas materi yang akan diberikan terhadap siswa dapat tepat sasaran dan sesuai dengan bidang ilmu pengajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan Blitar bagian Selatan, pemerintah daerah dapat mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS). Dengan ini, harapannya pembangunan tidak hanya selalu terfokus di Blitar bagian Utara melainkan juga harus tersebar sampai ke pelosok desa-desa tertinggal di Blitar bagian Selatan. Peranan Jalur Lintas Selatan (JLS) sangat

berperan penting untuk membangun perekonomian kawasan selatan, sebab kawasan selatan memiliki potensi kekayaan alam melimpah yang dapat dikembangkan, seperti potensi perikanan laut, dan pariwisata. Dengan bangkitnya perekonomian Blitar bagian Selatan, maka tingkat kesenjangan pembangunan di Kabupaten Blitar dapat diminimalisir atau dikurangi. Secara geologis, wilayah Blitar bagian Selatan rawan akan bencana alam sehingga diperlukannya strategi khusus dalam perencanaan pembangunan.

Disamping itu, kesenjangan pembangunan di Kabupaten Blitar disebabkan oleh beberapa indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya dari kekuatan pemilik modal (investor) dan Budaya. Pada Pendapatan Perkapita daerah yang mempengaruhi adalah PDRB dan jumlah penduduk. Beberapa indikator tersebut menjadikan Kabupaten Blitar memiliki tingkat pembangunan yang berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lain.

Salah satu penyebab utama kesenjangan pembangunan yang terjadi

antara Blitar bagian Utara dengan Selatan adalah letak geografis daerah. Hal ini disebabkan karena wilayah Blitar bagian Selatan adalah pegunungan, perbukitan dimana memiliki struktur tanah gerak dan sering terjadi bencana tanah longsor. Letak geografis yang berbeda tersebut mengakibatkan pembangunan yang ada di Blitar bagian Selatan membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada Blitar bagian Utara. Apabila anggaran pembangunan yang dikerjakan di Blitar bagian Selatan tidak terlalu besar, maka akan cepat mengalami kerusakan, jika dana pembangunan diberikan sama rata, maka kualitas jalan di Blitar bagian Utara jauh lebih bagus dari pada jalan-jalan di Blitar bagian Selatan. Oleh karena itu, infrastruktur jalan di Blitar bagian Selatan harus rutin diperbaiki setiap tahun oleh pemerintah daerah agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

Selanjutnya kesenjangan (*gap*) pembangunan di Kabupaten Blitar dapat juga ditelusuri dalam dua bidang pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat. Peneliti memakai teknik studi kasus untuk membandingkan kesenjangan

di Blitar bagian Utara dan Blitar bagian Selatan yaitu Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Bakung. Kesenjangan pembangunan di Sektor Pendidikan terjadi di Kabupaten Blitar bagian Utara dan selatan. SMPN 1 Kanigoro yang berstatus sekolah di pusat ibukota mendapatkan beberapa kelebihan dari SMPN 1 di Kecamatan Bakung. Selain itu, daya semangat belajar dan luaran pembelajaran (*learning outcomes*) dari siswa di Kecamatan Bakung kurang, sangat jauh berbeda dibanding dengan siswa-siswa di Kecamatan Kanigoro. Salah satu penyebabnya selalu SMPN 1 Kanigoro melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong siswa mengikuti bimbingan belajar, khursus atau mengikuti les bakat keterampilan siswa di luar sekolah dan selalu melakukan koordinasi dengan wali murid siswa. Bahkan SMPN 1 Kanigoro telah menyiapkan bimbingan belajar reguler di sekolah yaitu berupa pendalaman untuk siswa kurang mampu. Perbedaan tersebut mengakibatkan kualitas daya belajar dari siswa juga tidak sama. Selain itu, orang tua siswa di Kecamatan Bakung banyak yang menjadi TKI sehingga tidak ada pengawasan (monitoring) terhadap anak-anaknya yang

berasa di usia belajar di pendidikan dasar dan menengah.

Dari segi pembiayaan biaya sekolah pemerintah sudah membebaskan biaya sekolah, hal ini disebabkan sudah ada dana bantuan dari BOS. Namun, pada praktiknya masih tetap ada tarikan uang pada masyarakat yang dibayarkan kepada sekolah. Tarikan uang ini bersifat sukarela dan pengelolaannya dilakukan oleh Komite Sekolah. Salah satu penggunaan sumbangan ini adalah untuk membiayai kekurangan-kekurangan yang ada, seperti pada saat ada lomba atau acara tertentu. Selain itu, SMPN 1 Kanigoro memakai dana sumbangan ini untuk memberikan subsidi silang kepada siswa yang kurang mampu. Jadi siswa yang kurang mampu akan diberikan uang saku berjumlah Rp. 5.000.

Pada Sektor Kesehatan semua warga masyarakat diberikan hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Warga yang tidak memiliki BPJS akan diberikan rekomendasi oleh bidan desa untuk memperoleh SPM, sehingga akan mendapatkan pengobatan secara gratis. Di Puskesmas Kecamatan Bakung memiliki kualitas cukup baik. Dari segi kualitas bangunan Puskesmas di Kecamatan Bakung cukup baik dari pada Puskesmas

di kecamatan-kecamatan yang berada di Blitar bagian Selatan.

Namun, di Kecamatan Kanigoro tetap memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik dan lengkap. Hal ini dikarenakan di Kecamatan Kanigoro terdapat Rumah Sakit Swasta seperti Medika Husada dan dekat dengan RSUD Ngudi Waluyo yang berada di Kecamatan Wlingi.

Selanjutnya dari segi kultur sosial, masyarakat Kecamatan Bakung masih lebih terbelakang dibanding dengan Kecamatan Kanigoro. Hal ini dapat dibuktikan dari penggunaan jamban yang masih minim di Kecamatan Bakung. Banyak warganya di Kecamatan Bakung yang melakukan BAB di sungai (ODF), tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kebersihan air itu sendiri. Selain itu, dikarenakan letak kecamatan yang berada di area pegunungan mengakibatkan banyak air tergenang, sehingga dapat digunakan sarang nyamuk DBD untuk berkembang biak.

Rekomendasi

Ada beberapa hal yang direkomendasikan dari peneliti dalam hasil penelitian tentang kesenjangan pembangunan antara Kabupaten Blitar bagian Utara dan Kabupaten Selatan.

Adapun rekomendasi yang ditawarkan sebagai berikut:

1. Seperti yang diketahui Sektor Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan tentunya semua pihak harus bekerja sama. Hal tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.
2. Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan seharusnya lebih banyak dari daerah kecamatannya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu jarak tempuh dan kinerja dari tenaga pendidikan dan kesehatan.
3. Dalam pengelolaan dana Sektor Pendidikan dan Kesehatan, pembagian proporsinya harus bisa lebih adil, meskipun Kecamatan Bakung berada di Blitar bagian Selatan dan membutuhkan biaya besar, tetap harus diberikan fasilitas penunjang seperti di Blitar bagian Utara.
4. Selain fokus di pusat ibukota kabupaten Blitar, sebaiknya pemerintah daerah juga memperhatikan wilayah-wilayah pinggir Kabupaten Blitar yang langsung berbatasan dengan daerah lain dan selebihnya Pemerintah Kabupaten Blitar lebih intens lagi

dalam memprioritaskan pembangunan di kawasan pesisir selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut dekat dengan kabupaten lain, sehingga sangat mungkin terjadi pertukaran pelajar karena adanya sistem zonasi, sehingga masyarakat akan lebih memilih ke Kabupaten atau Kota yang lain yang memiliki kualitas pendidikan atau kesehatan yang lebih baik.

5. Sebaiknya pemerintah tidak hanya berfokus dengan pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga perlu adanya fokus pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Blitar bagian Selatan. Hal ini dikarenakan infrastruktur baik akses jalan, internet, listrik maupun air harus diperhatikan mengingat kebutuhan tersebut di era sekarang sangat diperlukan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidupnya, terlebih akses jalan merupakan penghubung suatu daerah untuk membantu kelancaran mobilitas (distribusi) perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho, G. (2017). Hubungan Perkembangan Wisata Terhadap Ekonomi Wlayah di Gunung Kidul

Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 16–27.

<http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.16-27>.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Pelayanan Umum: Pendidikan dan Kesehatan*.

Bappeda. (2018). *Kajian Kesenjangan Wilayah Di Kabupaten Blitar*.

Fan, S. & K. (2011). Chinas's regional disparities: Experience and Policy. *Review of Development Finance*, 1, 47–56.

<https://doi.org/doi:10.1016/j.rdf.2010.10.001>

Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada.

Kemdikbud. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. <https://www.kemdikbud.go.id>

Wawancara

Rina Mardiaty, Kepala Sub Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 21 November 2019, Pukul 13.01 WIB.

Lutfhi Aziz, Ketua Komisi IV DPRD
Kabupaten Blitar, 27 November
2019, Pukul. 10.15 WIB.

Farhan Mahfuzi, Ketua LSM Sitas Desa,
29 November 2019, Pukul 11.45
WIB.

Ulfatul Umami, Kepala Sub Bidang I
Bappeda Kabupaten Blitar, 3
Desember 2019, Pukul 13.45
WIB

Tentang Penulis:

Arifah Astagini merupakan mahasiswa angkatan 2015 di Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya Malang. Sejak lahir dan sampai sekarang menetap di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Aktif di Kelompok Diskusi tentang Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Ahmad Dellan Fahmi Effendy juga mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2016, fokus kajian yang disukai adalah seputar isu pembangunan daerah, politik lokal. Menetap di Kabupaten Kediri sampai sekarang.

Fathur Rahman adalah Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Penulis memiliki area riset seputar tema anti-korupsi, tata keuangan daerah, birokrasi pemerintahan.